



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 791/X/2013

II/OKTOBER 2013



Komisi X Dukung Pengembangan Kesenian dan Pariwisata Candi Borobudur



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA OKTOBER 2013

Minggu Kedua Oktober, kegiatan Dewan ditandai dengan Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan dan Rapat Konsultasi Ketua DPR dengan Presiden terkait Kasus Mahkamah Konsitusi.

Kegiatan Komisi III

Dengan agenda penetapan Pimpinan Komisi III DPR RI untuk Tahun Sidang 2013-2014. Rapat dipimpin oleh Drs. H.Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam. Rapat dilakukan selama dua hari, yaitu Senin 07 Oktober dan Selasa 08 Oktober 2013. Pada rapat tanggal 07 Oktober, melalui pembicaraan dan pembahasan mengenai posisi Ketua Komisi III yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat atas nama saudara Ruhut Poltak Sitompul SH, tidak mendapatkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Pada akhirnya, Ruhut mengajukan pengunduran diri sebagai calon Ketua Komisi III. Pengunduran diri Ruhut sebagai calon Ketua Komisi III disetujui rapat. Selanjutnya, Pimpinan Dewan menunggu calon pengganti Ketua Komisi III yang diajukan oleh Pimpinan Fraksi Demokrat dalam waktu secepatnya.

Dalam rapat Komisi III tanggal 8 Oktober, Pimpinan Rapat adalah Wakil Ketua bidang Inbang, Dr.Ir H Pramono Anung. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa telah diterima surat dari fraksi Partai Demokrat tertanggal 7 Oktober perihal perubahan pencalonan Ketua Komisi III yang semula adalah Ruhut Poltak Sitompul S.H, menjadi Saudara Dr. Pieter C Zilkifli Simabuea, MH sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Penggantian nama ini disetujui dalam rapat Komisi III secara aklamasi sebagai Ketua Komisi III. Dengan demikian, saudara Gede Pasek Suardika, SH., MH digantikan dengan saudara Dr. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH. Susunan Pimpinan pada Komisi III DPR RI masa bakti Tahun Sidang 2013-2014 adalah;

1. Saudara Dr. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH dari F-PD sebagai Ketua.
2. Saudara Dr. M Aziz Syamsuddin, SH dari P-PG sebagai Wakil Ketua.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



3. Saudara Ir. Tjatur Sapto Edy, MT dari F-PAN sebagai Wakil Ketua.
4. Saudara Drs. Al. Muzammil Yusuf, M.Si dari F-PKS sebagai Wakil Ketua.

Permasalahan Ketua MK

Kasus tertangkap tangannya Ketua MK oleh KPK baru-baru ini, telah memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga MK, mencederai eksistensi Lembaga Negara dibidang hukum. MK adalah Lembaga baru yang dibentuk pasca amandemen UUD 45 dan permasalahan ini dianggap sangat serius. Karenanya, Presiden mengundang Ketua Lembaga-Lembaga Negara, minus MK untuk berkonsultasi sebelum Presiden bertolak ke Bali untuk membuka forum APEC. Pada forum konsultasi ini telah didiskusikan upaya penyelamatan MK. Ketua DPR memberikan masukan, antara lain

berkaitan dengan, **Pertama:** masalah rekrutment. Bahwa selama ini pencalonan anggota MK diajukan oleh tiga dari unsur Pemerintah, DPR dan MA. Proses rekrutmen perlu dikaji ulang. **Kedua:** mengenai pengawasan terhadap etika/tingkah laku hakim dalam melaksanakan tugas. Tidak ada satu lembaga pun di negeri ini yang tidak diawasi. Maka MK pun perlu diawasi. Perlu dibahas pula lembaga mana berwenang untuk mengawasi dari pihak eksternal.

Dari konsultasi ini, keluarlah lima butir kesepakatan yang disampaikan oleh Presiden. **Pertama,** dalam persidangan di MK diharapkan dijalankan dengan penuh hati-hati, jangan ada penyimpangan baru. MK diminta menunda semua proses persidangan. **Kedua,** penegakan hukum yang dilaksanakan KPK dapat dilaksanakan lebih cepat dan konklusif. **Ketiga,** Presiden SBY berencana menyiapkan Perppu untuk diajukan ke DPR, yang antara lain akan mengatur per-

syarat aturan mekanisme seleksi pemilihan Hakim MK. **Keempat**, dalam Perppu itu perlu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK. **Kelima**, MK perlu diaudit eksternal.

Rapat Kerja Komisi VII

Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan beberapa Pemangku Kepentingan, menyimpulkan bahwa; 1. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menyetujui perlunya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap PT. Georga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara dengan memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba. 2. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi untuk menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gorga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara di kawasan hutan Tele, di kawasan Danau Toba Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. 3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk segera melakukan audit lingkungan kepada PT. Gorga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara di kawasan Danau Toba

secara menyeluruh. 4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup RI untuk membuat gerakan nasional penyelamatan Danau Toba.

Rapat Dengar Pendapat Komisi I

RDP Komisi I dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), LPP TVRI, LPP RRI, Dewan Pers dan Kementerian Luar Negeri dilakukan tanggal 3 Oktober 2013. RDP ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya; 1. Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip transparansi pada penyelenggaraan Pemilu 2014, Komisi I DPR RI minta KIP untuk memastikan diterapkannya prinsip keterbukaan informasi publik pada pelaksanaan Pemilu 2014. 2. Komisi I DPR RI minta LPP TVRI dan LPP RRI untuk secara fokus memberikan prioritas terhadap pemberitaan Pemilu 2014 secara adil dan berimbang untuk menyediakan informasi bagi publik. 3. Komisi I DPR RI mendukung Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MoU dan kerjasama antara KPU dengan Kemenlu, Kemenkominfo, Lemsaneg, KPI, KIP, LPP TVRI, LPP RRI dan Dewan Pers. ***

Komisi X Dukung Pengembangan Kesenian dan Pariwisata Candi Borobudur

DPR RI mendukung mewujudkan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata dalam dan luar negeri, serta tidak sekadar mengandalkan kedatangan turis. Salah satunya yang akan dilakukan adalah mengandalkan dunia pendidikan dan nilai-nilai luhur berbasis agama yang ada di Candi yang menjadi tujuh keajaiban dunia itu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto saat berkunjung ke Candi Borobudur, Kamis (3/10).

Ditambahkannya, Komisi X akan mengawal aspirasi masyarakat Borobudur, termasuk hal yang berkaitan dengan musik dan kesenian yang akan mendukung pariwisata sekitar Borobudur. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi X lainnya, Abdul Kadir Karding yang ikut dalam kunjungan tersebut.



Tim Komisi X DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto menyaksikan penampilan kesenian tradisional.

Kading mengapresiasi penampilan kesenian tradisional Kidung Karma Wibangga dan bangga dengan kesenian yang ada di Borobudur. Menurutnya, mengembangkan kesenian masyarakat Borobudur berarti juga melestarikan tradisi dan budaya bangsa.

“Kami memiliki beberapa program seni dan budaya untuk mendukung pengembangan Borobudur menjadi kawasan wisata dalam dan luar negeri. Oleh karena itu sudah selayaknyalah kelompok seni budaya yang ada disini

(Borobudur) bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi,” ungkap Kading.

Sementara itu, Koordinator Warung Info Jagad Cleguk, Sucoro mengaku bahagia dengan kunjungan dan dukungan dari Komisi X DPR RI yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata itu terhadap pengembangan budaya dan pariwisata sekitar Candi Borobudur. Hal tersebut sesuai dengan aspirasi yang ia utarakan kepada Komisi X ketika ia mendatangi gedung parlemen, Senayan bulan Juni lalu. Ketika itu ia meminta dukungan kepada

Komisi X agar keberadaan Candi Borobudur lebih bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Dalam Kunjungan Spesifik ini, selain Utut dan Kading, hadir pula anggota Komisi X lainnya Rinto Subekti, Ida Riyanti, Venna Melinda, Syamsul Bachri, Zulfadhli, TB. Dedi Suwandi Gumelar, Rohmadi, Nasrullah, Machmud Yunus, Nuroji, dan Muchtar Amma yang juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kesenian dan Pariwisata Candi Borobudur. (iw)/foto: iwan armanias/parle.

Palu Pasek Pindah ke Pieter



Wakil Ketua DPR Pramono Anung dengan Ketua Komisi III yang baru Pieter C. Zulkifli.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung secara resmi menetapkan Pieter C. Zulkifli menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Penetapan kader Fraksi Partai Demokrat ini, menggantikan calon sebelumnya Ruhut Siptompul yang menyatakan mengundurkan diri. Rapat pleno berlangsung cepat tidak lebih dari 5 menit.

“Saya mohon persetujuan apakah surat Fraksi Partai Demokrat sesuai ketentuan Tata Tertib pasal 52 ayat 8 yang mengusulkan saudara Pieter Zulkifli dapat disetujui sebagai Ketua Komisi III?” tanya Pram. Sahutan setuju terdengar disampaikan peserta sidang.

Dengan demikian komposisi pimpinan komisi yang mem-

bidangi masalah hukum dan keamanan ini adalah Ketua Pieter Zulkifli (FPD) dengan 3 orang wakil ketua; Aziz Syamsudin (FPG), Al Muzammil Yusuf (FPKS) dan Tjatur Sapto Edi (FPAN).

Pramono mengingatkan salah satu tugas penting yang segera menunggu Komisi III adalah uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. “Harapannya sebelum tanggal 25 Oktober sudah bisa diputuskan hasil

fit and proper test calon Kapolri tersebut, kalau tidak akan melewati waktu yang cukup panjang karena DPR akan memasuki masa reses,” paparnya.

Sementara itu dalam keterangannya kepada wartawan usai penetapan Pieter mengaku segera melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan dan seluruh anggota komisi. “Tentu perlu kerja sama yang baik mulai hari ini dan saat akan datang. Kita semua dapat dan mampu melaksanakan tugas negara dengan baik dan benar. Saya terharu dan tersanjung, semoga kesempatan ini membuat saya lebih banyak belajar mendalami dan melakukan tugas penting untuk kemaslahatan masyarakat,” pungkask dia. (iky), foto : wahyu/parle/hr.

Pansus DPR Optimis RUU PPDK Selesai Tepat Waktu

RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) yang sedang intensif dibahas oleh Pansus DPR, mengalami kemajuan berarti setelah pemerintah menyepakati beberapa persoalan krusial yang diinginkan Pansus DPR.

Rapat Kerja Pansus RUU PPDK dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Rabu (9/10), terus mengejar waktu pembahasan yang menyisakan satu kali masa sidang lagi. Seperti diketahui, pembahasan RUU ini sudah makan waktu empat kali masa sidang di DPR.

Ketua Pansus RUU PPDK Abdul Gaffar Patappe (F-PD), mengatakan, ada kemajuan berarti, karena pemerintah tampaknya sudah mau mengikuti pandangan Pansus DPR, di antaranya soal rencana penggabungan RUU PPDK ke RUU Pemda. Pemerintah sudah mulai mengurungkan niat itu, yang sebelumnya kukuh ingin disatukan saja ke dalam pembahasan RUU Pemda.

“Saya katakan, sudah ada kemajuan. Tadinya pemerintah sama sekali tidak mau bergeser,” ungkap Gaffar. Sudah banyak lobi-lobi dilakukan untuk mempercepat pembahasan RUU ini, baik ke internal Pansus, maupun kepada pemerintah. Pemerintah, kata Gaffar, tampak lebih responsif mengikuti alur pemikiran Pansus DPR.



Ketua Pansus RUU PPDK Abdul Gaffar Patappe didampingi Wakil Ketua Pansus Alexander Litaay.

“Akhirnya, kami optimis bahwa RUU ini akan selesai tepat waktu,” tandas Gaffar. Usai Raker dengan Mendagri, Pansus langsung melakukan rapat internal untuk menyikapi sikap pemerintah dan merancang agenda lanjutan pembahasan RUU ini. (mh) Foto: wahyu/parle.

DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

DPR RI menilai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan saat ini belum memberikan hasil yang optimal dalam penerapan prinsip pengamanan terhadap pengeluaran hasil inseminasi buatan, pencegahan penyakit hewan menular di dalam suatu wilayah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesejahteraan hewan.

Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2013 nomor urut 35,” kata Anggota Komisi



Anggota Komisi IV DPR Ivan Siagian.

IV Ivan Siagian dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, Rabu (9/10), di Gedung DPR RI.

Ivan menjelaskan sesungguhnya Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan muncul dengan harapan agar

sumber daya hewan pada sub sektor peternakan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa pangan, sandang, dan pakan. Pemanfaatan tersebut diatur agar mampu meningkatkan kesejahteraan peternak, menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan sektor ekonomi lainnya, dan mendukung kelestarian lingkungan.

Selain itu, pada tataran global eksistensi subsektor peternakan Indonesia dilakukan melalui komitmen-komitmen internasional sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar, khususnya bagi pengembangan subsektor peternakan di dalam negeri.

“Kenyataan menunjukkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan saat ini belum memberikan hasil yang optimal,” tegas Ivan Siagian

Selanjutnya, dia mengungkapkan bahwa Undang-undang ini mendapat perhatian dari masyarakat, peternak, pelaku usaha, dokter hewan, dan kelompok masyarakat lainnya. Sebagian dari kalangan tersebut, melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa substansi yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal inilah yang mendasari DPR RI melalui Komisi IV untuk

melakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009,” jelas Ian Siagian.

Patut diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Amar Putusan Nomor 137 Tahun 2009 dan Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan beberapa substansi dalam Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 68 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal-pasal tersebut terkait dengan penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan, penguatan otoritas veteriner, serta pemberian sertifikasi halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan. (as) Foto:wahyu/parle.

Komisi VII DPR Nilai Kinerja SKK Migas Belum Maksimal

Komisi VII DPR menilai secara keseluruhan kinerja SKK Migas pada tahun 2013 masih belum maksimal. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan Kepala SKK Migas Plt J. Widjonarko, dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatogana, di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis, (9/10).

Anggota DPR Tommy Adrian Firman (F-PPP) mengatakan, kinerja SKK Migas masih belum maksimal. Pasalnya berdasarkan laporan terlihat semakin bertele-tele terkait administrasi dan perijinan. “Jangan sampai birokrasi jadi ganjalan, masalahnya memang ada kepanikan di internal SKK sendiri,” tandasnya.

Menurutnya, dirinya mengharapkan kinerja semakin meningkat pasca tangkapnya mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. “Tunjukkan betul-betul tidak terguncang terhadap masalah yang jadi beban didalam SKK



Anggota Komisi VII DPR Tommy Adrian Firman dan jajaran SKK Migas.

Migas,” jelasnya.

Sementara anggota DPR Sutan Sukarnotomo dari Fraksi Partai Demokrat menyoroti target *lifting* pasca Rudi Rubiandini. Dirinya menilai masa Rudi Rubiandini Kinerja SKK Migas

cukup bagus, namun pasca Rudi target *lifting* terus menurun. “Pada Agustus target 800 ribu barel tapi nyatanya terus menurun apakah nanti bisa mengejar target sebesar 1 juta barel,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi III Datangi Rumah Calon Kapolri

Komisi III DPR RI mendatangi rumah calon Kapolri Komjen Pol. Sutarnan untuk menggali sejumlah informasi tentang latar belakang calon dan keluarganya. Sejumlah pertanyaan mengemuka dalam pertemuan tersebut termasuk bagaimana memperoleh rumah yang cukup luas di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan tersebut.

“Kunjungan pagi ini kita lakukan mendadak, kita baru beri tahu tadi malam supaya tidak ada kesempatan untuk mereka kaya sesuatu. Disini kita lihat keluarganya, kekayaannya,

kita tanya pandangan keluarga terhadap pencalonan Kapolri ini bagaimana,” kata Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi kepada wartawan usai kunjungan di Bintaro, Jakarta, Rabu (9/10/13).

la menyebut dari penilaian sementara kediaman calon Kapolri ini cukup wajar apalagi dibeli sudah cukup lama dan diperluas setahap demi setahap. “Tadi istri Pak Tarman cerita rumah dibeli sudah sejak lama dan bertahap bahkan ada yang dibeli waktu itu tidak dengan uang tapi dengan

beras, saya kira ini cukup wajar,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi III Pieter Zulkifli berharap masyarakat dapat segera menyampaikan masukan terhadap calon Kapolri sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan 17 Oktober nanti. Seluruh input itu akan digunakan untuk mendalami rekam jejak kandidat.

“Komisi III juga akan meminta data dari PPATK dan sejumlah pihak tempat dimana calon Kapolri ini pernah menjabat,” ujar politisi FPD yang baru saja ditetapkan menjadi ketua komisi bidang hukum dan keamanan ini.

Pada bagian lain Komjen Pol. Sutarman menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi di tubuh kepolisian. “Kita harus menolak pemberian apapun, kalau ada indikasi korupsi, kita harus berani menolak itu. Kita perlu merubah *mindset* untuk tidak korupsi itu di rumah kita, di lingkungan kita, di kepolisian dan seluruh masyarakat. Kita tidak mungkin merubah kalau tidak memulainya dari diri kita, kemudian kita merubah lingkungan,” pungkask dia. (iky/odji), foto : odjie/parle/hr.



Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR mengunjungi kediaman Calon Kapolri Komjen Pol. Sutarman.

Baleg Himpun Masukan Bahas RUU Pengendalian Minuman Beralkohol

Perlu adanya pengaturan tentang minuman keras atau miras, karena di Negara-negara Barat seperti Rusia, London dan Turki yang notabene cukup terbuka saja, tetap ada Undang-undang yang mengatur tentang Miras. Apalagi Indonesia yang merupakan bagian dari Negara Timur yang terkenal dengan norma ketimurannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Dimiyati Natakusumah saat RDPU dengan Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM) yang diketuai oleh Fahira Fahmi Idris, Rabu (9/10).

Ditambahkan Politikus dari Fraksi PPP ini, pengaturan Miras ini meliputi produksi, distribusi hingga pengawasan yang harus jelas. Karena menurutnya, jika tidak jelas maka kelak pengimplementasiannya di masyarakat akan sulit dan tidak bisa diikuti oleh seluruh daerah. RUU ini memang cukup mendesak mengingat tidak sedikit anggota masyarakat yang kehilangan harta benda, keluarga, masa depan dan bahkan nyawa akibat minuman keras.

“RUU Miras yang merupakan inisiatif dari FPPP ini masuk dalam Proleg-



Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah menerima cinderamata dari Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM).

nas dan menjadi prioritas UU di Tahun 2013 ini. Meski demikian kami ingin RUU ini nantinya akan menjadi UU yang benar-benar mengatur tentang pengendalian Minuman keras atau minuman beralkohol. Oleh karena itulah kami tidak ingin terburu-buru hanya karena untuk mencapai target menyelesaikan RUU ini,” jelas Dimiyati.

Sementara itu Ketua Umum GENAM, Fahira Idris mengatakan bahwa

saat ini Indonesia menjadi surganya miras, karena peredaran miras sama sekali tidak ada aturannya, terlebih lagi setelah MA (Mahkamah Agung) mencabut Kepres No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minum Beralkohol. Bahkan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang perdagangan Miras seperti “Macan Kertas”.

“Tidak ada kontrol tentang miras

selama ini, yang ada setiap harinya sekitar 50 nyawa anak bangsa melayang akibat Miras. Oleh karena itu kami mendukung bahkan mendesak DPR RI untuk membuat RUU tentang pengendalian minuman beralkohol ini,” jelas Fahira.

Terkait tentang RUU Pengendalian Minuman Beralkohol ini, Fahira memberi masukan untuk mencantumkan

juga pembatasan tentang jam, dan tempat atau jarak berjualan, seperti berapa meter dari perumahan, masjid, sekolah dan sebagainya. Selain itu yang tidak kalah pentingnya harus dibahas dan dicantumkan dalam RUU itu menurut Fahira adalah tentang batasan usia pemakai serta larangan promosi. Namun tentunya ditambahkan Fahira yang paling penting adalah adanya sanksi yang tegas bagi pelang-

gar larangan tersebut.

“Dengan adanya sanksi yang tegas akan membuat efek jera bagi pelanggar. Ini semua demi terciptanya generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Untuk itu kami mendorong Baleg DPR RI untuk bisa membuat dan menyelesaikan RUU Pengendalian Minuman Beralkohol ini,” pungkasnya. (Ayu),
foto : riska/parle/hr.

SEAPAC Galang Kebersamaan Parlemen Asean Lawan Korupsi



Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Sidang Umum SEAPAC (*Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption*) yang akan digelar di Medan pada 23-24 Oktober mendatang bertujuan memperkuat komitmen untuk membebaskan Asia Tenggara dari korupsi demi terciptanya komunitas bersama ASEAN 2015 yang bebas dari korupsi.

“Sidang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat komitmen Asia Tenggara yang bebas korupsi dalam mewujudkan *good governance* dan meningkatkan rasa kebersamaan serta membangun rezim anti korupsi yang kuat di lingkungan ASEAN, terkait rencana pembangunan komunitas ASEAN 2015,” tegas Ketua SEAPAC yang juga Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta baru-baru ini.

Karena itu menurut Marzuki diperlukan dukungan dan komitmen dari anggota-anggota parlemen untuk memberantas korupsi. Salah satu langkahnya adalah membangun kebersamaan diantara anggota-anggota parlemen ASEAN

melalui SEAPAC. “Intinya adalah bagaimana parlemen punya komitmen memberantas korupsi dengan membangun kebersamaan diantara anggota parlemen Asean, karena disadari sebagai negara demokrasi, korupsi tidak hanya terjadi di wilayah eksekutif tapi juga legislatif,” ungkapnya.

Dalam sidang nanti, lanjut Marzuki akan dibicarakan lebih jauh bentuk kerjasama parlemen di ASEAN dalam melawan korupsi sehingga bisa terbentuk benteng moral melawan korupsi. “Pertemuan ini juga akan membicarakan bagaimana membentuk benteng moral, terlepas dari konteks agama, sehingga bisa meningkatkan upaya pencegahan korupsi dan parlemen-parlemen ASEAN termasuk DPR RI sebagai bagian dari pilar demokrasi bisa ikut berperan serta secara aktif melakukan ini,” imbuhnya.

Masalah korupsi sudah menjadi masalah regional terutama negara-negara di ASEAN yang sedang berkembang. Negara ASEAN yang sedang membangun melupakan pembangunan karakter yang harusnya menjadi dasar mempersiapkan negara pembangunan itu sendiri untuk menjadi lebih maju. Diingatkan, dalam pembangunan yang sedang dijalankan akan banyak godaan, kalau kita tidak siap maka akan banyak korupsi karena begitu banyak peluang untuk melakukan itu. Tanpa kesiapan karakter sulit menghindari dari godaan, sebab manusianya akan lebih suka menjadi kaya dengan melanggar aturan.

Kepada anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara yang mendapatkan mandat dan aspirasi rakyat, ditegaskan Marzuki Alie, harus mendorong negaranya meratifikasi aturan-aturan dari konvensi PBB melawan korupsi dan bisa meningkatkan kerjasama anti korupsi. “Misalnya mendorong kerja sama antar negara ASEAN di bidang hukum yang dapat mencegah korupsi, memberikan hukuman dan mengembalikan aset-aset yang dilarikan ke luar negeri untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Keterlibatan anggota-anggota SEAPAC diharapkan dapat memberikan kontribusi global melawan korupsi,” tegasnya.

Terkait kerjasama pemberantasan korupsi terutama dengan Singapura dimana banyak koruptor dari Indonesia yang melarikan diri dan sulitnya mengekstradisi mereka



dari negeri Singa itu, serta sulitnya mengembalikan aset-aset negara hasil korupsi di negeri itu, Marzuki mengaku telah bertemu dengan ketua parlemen Singapura. “Saya sudah bertemu dengan Ketua Parlemen Singapura dan mereka berjanji akan menyampaikan hal itu ke pemerintah Singapura,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Gugus Tugas Nasional Gopac (*Global Organisation of Parliament Against Corruption*) sebagai

pelaksana Sidang Seapac, Pramono Anung mengingatkan sudah waktunya parlemen di Asia Tenggara ini meratifikasi untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kejahatan korupsi khususnya pencucian uang. Sebab salah satu kelemahan dari gerakan korupsi di berbagai negara, begitu uang dikeluarkan dari negara yang bersangkutan maka tidak bisa ditelusuri. Karena itu kita sepakat untuk membuat deklarasi, salah satunya adalah berkaitan dengan pencucian uang. (mp), foto : dn/parle/hr.

Proses Industrialisasi Gagal

Rakyat Indonesia miskin karena proses industrialisasi gagal. Indonesia mengekspor barang mentah dan mengimpor barang jadi. Akhirnya, rakyat menjadi konsumen modernisasi bukan produsen modernisasi.

“Kita perlu merancang dan mengawal industrialisasi sesuai amanat konstitusi. Cita-cita kita saat merdeka sangat sederhana. Cukup sandang dan pangan, tapi itu saja tak tercapai.” kata Ketua Panja RUU Perindustrian, Hendrawan Supratikno, bersama peneliti LPEM UI, I Kadek Sutisna, dan Pengurus Harian YKLI, Tulus Abadi, dalam Forum Legislasi bertema RUU Perindustrian, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/10).

Dia mengutip pasal 33 UUD 1945 ayat 5 yang mengandung perintah membuat UU perekonomian nasional. Tapi sejauh ini pembahasannya berlarut-larut dan UU belum berjalan. Draft masih kasar dan respons akademisi tak menggembirakan. Begitu pula Rancangan Undang-undang (RUU) Perindustrian untuk menggantikan UU 5/1984 tentang Perindustrian.

“Anggota DPR harus semangat, cukup kesehatan dan tidak loyo. Kalau loyo, hasilnya nanti sontoloyo,” tegasnya menyemangati diri dan rekan-rekannya.

Dalam naskah RUU Perindustrian tersebut ada upaya pemerintah untuk menonjolkan nasionalisme ekonomi. Karena ada pasal-pasal yang mengatur bahwa bahan mentah tidak bisa diekspor sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ada komitmen memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Ada upaya serius bagaimana mewu-



Ketua Panja DPR untuk RUU Perindustrian Hendrawan Supratikno dan Peneliti LPEM UI I Kadek Sutisna.

judkan proses hilirisasi industri untuk memperluas jangkauan standarisasi. Intinya, melarang ekspor barang mentah, jadi bahan mentah itu diolah dulu menjadi bahan matang agar bernilai lebih,” tuturnya.

Menurut Hendrawan, perlu budaya industri yang tangguh agar muncul sikap disiplin dan konsisten. Di Jepang, satu perusahaan tumbuh dan berkembang menjadi besar, maka perusahaan kecil akan tepuk tangan. “Berbeda dengan Indonesia, jika ada perusahaan tumbuh besar, maka perusahaan kecil kalau perlu dihisap sampai kering,” keluhnya.

Ada pasal-pasal yang masih harus dicermati. Contohnya, perusahaan

atau industri baru wajib berlokasi di kawasan industri. Artinya, fasilitas harus memadai, karena jika tidak maka hanya menambah ongkos.

Hendrawan Supratikno berharap RUU ini bisa selesai sebelum terpilihnya DPR yang baru 2014. “Kita berharap selesai akhir September 2014,” ucapnya. Yang paling penting, kata Guru Besar FEUI ini, RUU ini harus berjalan sesuai dengan konstitusi, yakni cita-cita mensejahterakan rakyat.

Menurut I Kadek Sutisna, RUU Perindustrian dinilai belum berpihak pada industri kecil (UMKM), terutama dalam masalah pembiayaan, karena tidak mendorong industri perbankan untuk menjadi sumber pembiayaan. “Dalam

RUU ini belum terlihat upaya pemerintah mengembangkan pembiayaan, khususnya dari sektor perbankan nasional untuk mendukung industri lokal,” katanya.

Malah dalam RUU ini, kata Kadek, lebih banyak dan masih menekankan pada sumber pembiayaan pemerintah. “Apalagi semua UMKM di Indonesia itu, tidak peduli pada tingkat suku bunga. Mestinya, hal ini harus menjadi fokus dalam pembiayaan industri nasional,” terangnya.

Diakui Kadek, sektor industri menjadi salah satu motor penggerak perekonomian negara. Sekitar 29% PDB nasional disumbang dari industri. Namun dari survey LPEM UI, ternyata

sejumlah industri padat karya, seperti furniture, alas kaki, dan tekstil justru mengeluhkan soal upah. “Ini menjadi hambatan daya saing,” tegasnya.

Padahal dalam semangat RUU Perindustrian ini, lanjutnya, ada dua semangatnya, yakni menciptakan daya saing dan menciptakan nilai tambah. Sayangnya, semua tujuan itu sulit tercapai. Karena industri lokal harus menempuh prosedur panjang untuk ekspor. “Survei LPEM pada 2006, menunjukkan untuk melakukan ekspor perlu melewati 19 institusi,” ujarnya.

Tulus Abadi sepakat bahwa *ending* produk RUU Perindustrian itu memang harus memiliki ideologi.

Masalahnya, saat ini fenomena yang terjadi adalah deindustrialisasi. “Nah, bisa tidak RUU marwahnya mengembalikan denyut industrialisasi,” tukasnya.

Menurut Tulus, harus dijelaskan dalam RUU ini, mana produk-produk industri yang ramah lingkungan. Sementara pihak industri harus bisa menjawab tantangan ini.

Oleh karena itu, kata Tulus, jangan sampai ada pasal-pasal selundupan dalam RUU ini. “Yang juga perlu diperhatikan soal nilai tambah, makanya saya sepakat memasukkan adanya *green* industri, mulai dari energi hingga produk-produknya,” cetusnya. (as), foto : wahyu/parle/hr.

Komisi VI Desak Pemerintah Evaluasi Tataniaga Gula

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan pemerintah menyoal banyak keseragaman tataniaga gula. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan cita-cita swasembada gula. Dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) harus bertanggung jawab atas anjloknya harga gula petani berbasis tebu.

Demikian mengemuka saat Komisi VI RDP dengan Deputi BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, AGRI, dan 11 perusahaan gula rafinasi, Selasa (8/10). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) didampingi Wakil Ketua lainnya Azam Azman (F-PD).

Dalam salah satu kesimpulan rapatnya, Komisi VI mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan tataniaga gula, khususnya pola distribusi gula rafinasi agar tidak merugikan produsen gula konsumsi dalam negeri yang berbasis tebu. Selain itu, Komisi VI juga mendesak pemerintah agar melakukan pengendalian harga.

Seperti diketahui, para petani tebu sempat berdemonstrasi ke Kemendag menuntut perbaikan harga gula berbasis tebu yang kini anjlok akibat membanjirnya gula rafinasi ke pasar konsumsi. Selama ini, kata Aria, AGRI yang membawahi para produsen gula rafinasi juga seperti tak berbuat apa-apa melihat realitas ini.

Dan Kemendag tak mengeluarkan sanksi apa pun kepada



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dan Azam Azman.

produsen yang telah menyeludupkan gula rafinasi ke pasar konsumsi tersebut. Mestinya ada sanksi tegas berupa pencabutan izin produksi kepada pabrikan gula yang melanggar Peraturan Presiden No.36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Aria lalu meminta agar ada data tunggal yang akurat dan bisa dijadikan acuan bersama menyangkut neraca gula, baik gula berbasis tebu maupun *raw sugar*. Sebetulnya, Komisi VI sudah punya Panja Gula yang hingga kini belum ditindaklanjuti pemerintah. (mh), foto : odjie/parle/hr.



Daerah Kepulauan Berwenang Kelola Kekayaan Laut



Pimpinan Pansus RUU PPDK berjabat tangan dengan Mendagri Gamawan Fauzi.

Daerah provinsi yang berciri kepulauan diharapkan bisa mengelola kekayaan lautnya dengan lebih optimal. Ini merupakan bagian dari semangat kebijakan desentralisasi. Bahkan, ada keinginan agar daerah kepulauan membentuk provinsi sendiri.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja (Raker) Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDK) dengan pemerintah yang diwakili Kemendagri, Kemenkum HAM, dan Bappenas, Rabu (9/10). Raker dipimpin Ketua Pansus RUU PPDK Abdul Gaffar Patappe (F-PD), didampingi dua wakilnya masing-masing Alexander Litaay (F-PDI Perjuangan) dan Fary Djemy Francis (F-Gerindra).

Fary mengungkapkan, sembilan fraksi dalam Pansus

sudah sepakat meneruskan pembahasan RUU ini, setelah sebelumnya pemerintah sempat menginginkan agar RUU ini digabung saja dalam pembahasan RUU Pemda yang juga sedang dibahas. Mengingat pentingnya daerah kepulauan, maka ada pula usulan dari DPD RI, agar daerah provinsi bercirikan kepulauan membentuk provinsi sendiri. Selama ini daerah kepulauan menginduk pada provinsi lain.

Dengan membentuk provinsi sendiri, ia bisa punya anggaran dan kewenangan mandiri untuk membangun dan mengelola sumber daya alamnya. Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini, Mendagri Gamawan Fauzi menyampaikan di hadapan Raker tersebut bahwa daerah kepulauan nantinya bisa mengelola sendiri kekayaan lautnya sebagai sumber daya alam utama.

Bahkan, Mendagri menyampaikan, daerah provinsi berciri kepulauan ini akan diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan di bidang kelautan melalui mekanisme pembantuan. Dan pembangunan daerah provinsi kepulauan juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Itu berarti ada banyak dukungan kebijakan untuk benar-benar mempercepat pembangunan di daerah kepulauan.

Ketua Pansus RUU PPDK Abdul Gaffar menyambut baik pandangan pemerintah tersebut. Dan akan segera menindaklanjutinya dalam pembahasan RUU ini bersama anggota Pansus lainnya. (mh) Foto: wahyu/parle.

MK Tak Perlu Dibubarkan, Tapi Kewenangan Tangani Sengketa Pilkada Dihilangkan

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, kasus tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar karena MK diberi tugas tambahan menangani masalah sengketa pilkada. Itu adalah awal dari para hakim MK yang dianggap sebagai manusia setengah dewa masuk ke masalah politik praktis, karena keputusannya adalah bersifat politik praktis.

“Kalau hanya bersumber pada UUD 45 pasal 24 c mengenai kewenangan sengketa antar lembaga negara, atau uji materi terhadap Undang-undang, saya yakin dan pasti terlindung dari jeratan *money* politik. Tapi begitu diberi kewenangan sengketa pilkada dan bersifat final, di situlah asal muasalnya dan tergoda penyuaapan,” kata Pramono menjawab pers di ruang kerjanya, Senin (7/10).

Pimpinan Dewan dari PDI Perjuangan ini menegaskan, MK tak perlu lagi tangani sengketa pilkada. Sengketa pilkada serahkan kepada pengadilan yang prosesnya diperbaiki,



Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

dibanding yang sekarang ini. Saat ditanyakan mengenai pandangan agar MK dibubarkan, dia menyatakan tidak sependapat.

“Saya tidak setuju MK dibubarkan. Tetapi setuju, kewenangan MK yang berkaitan dengan politik praktis itu harus dihilangkan, terutama sengketa pilkada,” ujarnya lagi.

Kepada KPK, Pramono menyatakan akan terus mendorong lembaga itu untuk mengungkap siapa saja aktor di tubuh MK, menyusul tertangkapnya Akil Mochtar. Aktor lain itu bisa hakim atau dari unsur birokrasinya. “Sebab rumusnya orang korupsi tidak mungkin sendirian, pasti melibatkan orang lain. Saya termasuk orang yang mendorong

itu, buka saja kasus itu,” tegasnya.

Ketika ditanyakan adanya tuduhan bahwa kasus ini sebagai upaya untuk menjatuhkan MK karena MK mau mengimpeach Presiden SBY, Pramono dengan tegas mengatakan tetap mempercayai KPK. Menurut Pramono, KPK tidak bisa disetir siapapun. Kalau KPK bisa diatur oleh pemerintah atau kekuasaan, sudah terbukti besan Presiden SBY saja tidak bisa dilindungi. Selain itu Ketua Umum partainya juga tidak bisa dilindungi. “Saya percaya kepada KPK. Tidak mau berprasangka dan masuk ke teori konspirasi. Biarkan saja KPK menyelesaikan kasus ini,” ia menandatangani (mp), foto : odjie/parle/hr.

Pemerintah Seharusnya Antisipasi Gangguan Jiwa Jemaah Haji



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa.

Dalam penyelenggaraan haji tahun 1434 H/ 2013 M ini mengalami penurunan tingkat angka kematian. Meski demikian terdengar kabar dari tanah suci, sedikitnya empat puluh jemaah haji mengalami gangguan jiwa di tanah suci. Hal ini menurut Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa seharusnya dapat dilakukan antisipasi sejak dari tanah air.

“Sebenarnya hal tersebut bisa dihindarkan, jika jemaah melakukan Manasik Haji sebanyak 10 kali sesuai kurikulum yang ada. Kurikulum yang dimaksud meliputi bimbingan beribadah, cara merawat kesehatan diri dalam persiapan keberangkatan dan

selama beribadah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah pengenalan terhadap peralatan atau fasilitas yang akan ditemui, seperti fasilitas hotel, kondisi di pesawat terbang, MCK (Mandi Cuci Kakus) di Armina, hak yang diperoleh jemaah, serta tips sederhana dan praktis lainnya,” jelas Ledia, ketika dihubungi Parle langsung dari tanah suci, Kamis (10/10).

Ditambahkan Ledia, kenapa hal

tersebut harus dilakukan, karena kebanyakan gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan pada jemaah haji itu disebabkan karena stress, tegang atau bisa juga karena demensia (kelupaan).

“Jangan dibayangkan gangguan jiwa yang dimaksud itu seperti orang-orang yang kita temui berkeliaran di jalan-jalan di tanah air. Gangguan ini berupa gangguan psikosomatis yang juga bisa disebabkan karena gangguan penyesuaian,” ungkap politisi dari Fraksi PKS ini.

Dijelaskannya, gangguan penyesuaian itu seperti jemaah yang belum

pernah naik pesawat terbang, dan pertama kali naik pesawat harus dijalani selama 9 jam. Selain itu jemaah juga harus beradaptasi dengan orang lain dalam satu kloter dengan berbagai macam kebiasaannya, termasuk penggunaan toilet di pesawat.

Selain itu, penyesuaian lain yang juga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan psikosomatis pada jemaah haji adalah penggunaan kamar mandi di pemondokan atau hotel yang menggunakan shower padahal tidak sedikit jemaah yang terbiasa menggunakan gayung dan ember. Dan penyebab lainnya stress pada jemaah haji di tanah suci adalah ketidaksiapan melihat jumlah manusia yang begitu banyaknya. Apalagi mereka juga harus berdesak-desakan masuk masjid, atau thawaf atau sa'i.

Sementara itu Kabid Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Fidiansjah seperti yang dilansir dari berbagai media nasional mengungkapkan, jemaah haji Indonesia yang mengalami gangguan jiwa di Tanah Suci kebanyakan berusia lanjut, yaitu di atas 60 tahun. Secara kumulatif, jemaah yang mengalami gangguan jiwa 40 orang, 25 orang dari Madinah, dan 15 jemaah dari Makkah yang sudah diperkenankan pulang. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jumlah jemaah yang terganggu jiwanya ini bisa mencapai 300-400 orang hingga akhir prosesi haji. (Ayu) Foto: rizka/parle.

Missing Link dalam Sejarah Bangsa Tidak Boleh Terjadi

Sampai hari ini bangsa Indonesia seperti melupakan peran penting Mr. Assaat dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Perannya sebagai Pemangku Jabatan/Acting Presiden RI pada tahun 1949-1950 belum dihargai dengan layak.

“Mr. Assaat jasanya pada republik sangat luar biasa. Dia bukan *acting* presiden tapi presiden saat itu. Dia sebagai presiden saat memimpin upacara kenegaraan wafatnya Jenderal Sudirman, saat menandatangani statuta pendirian UGM Yogya, tapi pengakuan itu belum ada. Jangan sampai ada *missing link* dalam sejarah republik ini,” kata anggota Komisi III Nudirman Munir, saat bicara dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/13).

Mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI ini menyebut seiring dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, Presiden RI Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden. Kalau ini tidak diakui berarti ada kekosongan sejarah, RI pernah menghilang akhir 1949 dan kemudian muncul lagi Mei 1950 setelah kembali ke bentuk

negara kesatuan.

Sebagai seorang presiden, Assaat yang menyelesaikan studi hukumnya di Belanda tampil sebagai pemimpin negara yang sederhana. Ia pernah bersikeras melakukan perjalanan dengan sepeda walaupun saat itu disediakan mobil kepresidenan.

“Kalau kemudian Mr. Assaat terlibat dengan pergerakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) itu adalah bagian sejarah lain yang tentu tidak menghapus babak sebelumnya. Apalagi telah keluar Kepres no.28/2006 gerakan itu ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, bagian yang tidak terpisahkan dari proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI,” tandasnya.

Mr. Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan. Ia juga pernah mencetuskan gagasan wawasan nusantara yang ke-



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir.

udian dikonkritkan menjadi kesepakatan internasional Deklarasi Djuanda, ini memperkokoh eksistensi NKRI yang terdiri dari ribuan pulau.

“Bangsa ini harus mampu berbesar hati untuk menulis sejarahnya dengan benar dan memberikan penghargaan kepada para tokohnya dengan layak. Sudah sepatutnya Mr. Assaat dianugerahi gelar Pahlawan Nasional,” demikian Nudirman. (iky) Foto: wy/parle.

DPR Serahkan DIM RUU KUHP dan KUHP

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI telah menuntaskan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU KUHP (Kitab UU Hukum Pidana) dan RUU KUHP (Kitab UU Hukum Acara Pidana). Dalam rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menkumham Amir Syamsudin, DIM diserahkan secara resmi.

“Secara simbolis telah saya sampaikan DIM fraksi kepada pemerintah. Saya yakin fraksi akan *full* perhatian pada RUU ini, kita minta komitmennya. Masyarakat tentu akan melihat fraksi mana yang serius. Rapat akan kita lakukan secara terbuka,” kata Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin, (7/10/13).

Ia menjelaskan DIM yang dihimpun cukup banyak, RUU



Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menyerahkan DIM RUU KUHP dan KUHP kepada Menkumham.

KUHP khususnya buku kesatu 1704 DIM, buku kedua 1596 DIM dan RUU KUHP 1169 DIM. Semuanya diklasifikasi berdasarkan jenis masalah diantaranya redaksional, meminta catatan atau penjelasan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut waktu untuk pembahasan 2 RUU penting ini tidak banyak hanya satu tahun lebih sampai masa tugas anggota DPR periode ini berakhir. Pemerintah sebagai pengusul dimintanya menghimpun masukan segenap *stakeholder* seperti KPK, MA dan asosiasi pengacara karena merekalah *user* dari produk legislasi ini.

“Jadi mereka tidak larut dalam lempar opini di media, hanya saja dalam persidangan seluruh masukan itu sudah

bulat menjadi satu suara pemerintah,” tekannya.

Sementara itu Menkumham berharap pembahasan bisa dilaksanakan simultan dan permasalahan dikelompokkan dalam *cluster*. Mengingat masa kerja anggota dewan terbatas hanya sampai bulan April 2014, ia mengusulkan prioritas pada buku satu RUU KUHP.

“Prioritas hendaknya diberikan pada buku satu karena mengingat disitu terdapat azas pemidanaan, tujuan pemidanaan, aturan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan menciptakan Sistem Hukum Pidana Nasional. Harapan kami buku kesatu tidak perlu menjadi warisan untuk DPR periode berikutnya,” demikian Amir. *(iky)foto:wahyu/parle.*

Sekjen DPR Gelar Pertemuan dengan Sekjen Parlemen Negara Sahabat



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti mengadakan pertemuan dengan Sekjen Parlemen negara sahabat di sela-sela Sidang ASGP di Jenewa, Swiss.

Di sela-sela ASGP Meeting, yang berlangsung 7-9 Oktober di Jenewa Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti mengadakan pertemuan bilateral dan silaturahmi dengan beberapa Sekretaris Jenderal Parlemen negara sahabat, yang menghasilkan berbagai kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Pertemuan bilateral antara lain dengan Sekjen Parlemen Turki, Sekjen Parlemen Myanmar, Sekjen Parlemen Jerman.

Dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen Parlemen Turki disepakati realisasi pembentukan ASGP negara-negara Islam yang akan dimulai dengan pertemuan pertama para Sekjen yang direncanakan akan diselenggarakan di Ankara, Turki. Disamping itu disampaikan kesiapan Turki dalam menerima kunjungan delegasi Sekjen DPR RI ke Turki yang direncanakan pada tanggal 22-28 November 2013.

Dalam pertemuan dengan Sekjen Parlemen Myanmar disepakati kesiapan Myanmar dalam menerima kunjungan Sekjen DPR-RI pada tanggal 18-22 November 2013 guna menyampaikan presentasi tentang struktur parlemen Indonesia dan prosedur kerja parlemen dan pertemuan-pertemuan dalam rangka mempererat kerja sama antar parlemen.

Sedangkan pertemuan dengan Sekjen Parlemen Jerman disepakati kesiapan Jerman dalam menerima kunjungan Delegasi AIPA Visit tanggal 2-8 November 2013. Sekjen DPR RI juga melaku-

kan pertemuan ramah tamah dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan kesepahaman dengan Sekjen Parlemen Kamboja, Sekjen Parlemen Thailand, Sekjen Parlemen Republik Ceko, Sekjen Parlemen Pakistan, Sekjen parlemen Belanda, Sekjen Parlemen Uganda, Sekjen Parlemen Afghanistan, Sekjen Parlemen Nepal, Pejabat Parlemen Timor Leste.

Direncanakan Sidang ASGP berikutnya akan diselenggarakan tanggal 17-24 Maret 2014 di Jenewa -Swiss bersamaan dengan Sidang Assembly ke-130 IPU. Dalam agenda pertemuan ASGP tersebut Sekjen DPR RI akan menyampaikan presentasi mengenai “*Rebuilding Public Trust in Parliament*”. *(mp), foto : dok/parle/hr.*



Pusat dengan Daerah Harus *In Line*

Anggota Komisi IX DPR Indra (F-PKS) meminta pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus *in line* atau sejalan. Ia menilai, selama ini kondisi di lapangan masih terjadi *miss link* antara pusat dengan daerah. Hal itu disampaikan saat RDP dengan Eselon I Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Saya mengapresiasi program yang dijalankan oleh BKKBN, yang sedang giat-giatnya mensosialisasikan *bonus demography* di berbagai media dan event. Saya memberi catatan, terkait optimalisasi proses sosialisasi di lapangan, masih ada *miss link* antara pusat dengan daerah. Apapun yang di sepakati antara BKKBN dengan Komisi IX itu harus *in line* dengan yang di daerah,” jelas Indra di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senin (7/10).

Politisi F-PKS ini menekankan apa yang disepakati di pusat, itu harus dijalankan juga di daerah. Sehingga, dengan sejalanannya antara pusat dan daerah, akselerasi di daerah semakin bagus. “Komitmen kami adalah mensukseskan program kerja BKKBN,” imbuh Indra.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh memberikan catatan terkait pengadaan alat

kontrasepsi. Ia meminta, jangan ada perantara lagi, melainkan langsung ke perusahaan atau produsennya.



Anggota Komisi IX DPR Indra.

“Kita punya BUMN yang produksi (alat kontrasepsi, RED) itu, jadi ya sebenarnya beli di situ juga. Jangan *muter-muter* dulu, harus bisa diefisiensi anggarannya. Tujuannya sama, yang ujungnya masyarakat merasakan langsung,” ujar Poempida.

Terkait dengan bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Poempida memberikan opsi untuk merekrutnya saja. Selain bertujuan untuk menekan kematian ibu atau bayi pada proses

kelahiran, perekrutan bidan PTT ini juga memberi kepastian kepada mereka.

“Bidan-bidan PTT yang tahun depan mulai memasuki masa pensiun, dan tidak bisa memperpanjang masa kerjanya, bisa rekrut mereka dalam konteks menekan kematian ibu, ini juga sesuai dengan program Kementerian Kesehatan. Selain itu, dari pada Bidan PTT ini tidak mendapatkan tempat, ini kita berdayakan dan mempunyai karir permanen,” tambah Poempida.

Dalam rapat ini, Komisi IX menyetujui pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp 2,688 triliun dan usulan inisiatif baru sebesar Rp 200 miliar. Sehingga, pagu anggaran BKKBN tahun 2014 menjadi sebesar Rp 2,888 triliun. Anggaran ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 sebesar 2,67 triliun.

“Komisi IX dapat menerima pagu anggaran dan menyetujui usulan inisiatif baru tahun anggaran 2014, dan meminta BKKBN untuk melakukan optimalisasi program dan kegiatan, dengan memperhatikan masukan dari anggota Komisi IX,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno saat membacakan hasil kesimpulan. (sf)foto:odjie/parle.

Komisi X Minta Pengamanan Museum Berstandar Bank

Hampir dipastikan pengamanan museum di seluruh Indonesia belum memenuhi kualifikasi standar mutu yang memadai. Hal tersebut diungkapkan TB. Dedi Suwandi Gumelar atau yang akrab disapa Mi'ing usai meninjau Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, Jum'at (4/10).

Dikatakannya, beberapa museum telah terbukti kehilangan barang-barang berharga yang merupakan benda-benda cagar budaya. Antara lain, Museum Radya Pustaka di Surakarta, Museum Sonobudoyo di Yogyakarta, dan Museum Gajah di Jakarta. De-



Anggota Komisi X DPR TB. Dedi Suwandi Gumelar.

ngan demikian menurutnya, petugas keamanan yang berjaga di museum harus melebihi kualitas petugas keamanan di perbankan.

Analoginya sederhana, kata Mi'ing, kalau di Bank Indonesia ada satu gudang uang dengan pengamanan yang memadai, tidak mungkin maling akan mampu membawa uang satu gudang, jumlah uang yang dicuri biasanya satu atau dua tas, dan uang yang hilang pun bisa diganti kembali.

“Bagaimana kalau yang hilang barang peradaban seribu tahun lalu?

Siapa yang mampu memutar waktu seribu tahun kembali, itu barang tak tergantung,” jelasnya.

Oleh karena itulah Mi'ing menolak usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh untuk membuat replika atau duplikat untuk dipajang di museum. Selain nilai sejarahnya yang tidak ada, anggaran yang akan dikeluarkan juga tidak kecil. Bahkan pemerintah juga harus menyediakan anggaran khusus untuk mengamankan benda yang asli.

“Benda-benda yang asli saja disimpan di museum masih banyak orang yang tidak datang, apalagi yang replika, Jadi kenapa tidak diperkuat saja pengamanannya, otomatis nilai sejarahnya makin tinggi,” tambahnya.

Saat dijumpai di tempat yang sama, Kepala Museum Sonobudoyo, Riharhani menjelaskan bahwa saat ini baru ada 11 tenaga keamanan. Mereka harus bergantian menjaga museum. Pengamanan terbagi menjadi dua unit pada siang dan malam. Mereka merupakan

tenaga *outsourcing* dari CV Garuda Merah yang merupakan rekanan dari Dinas Kebudayaan DIY.

Seperti diketahui, kasus pencurian sejumlah koleksi di Museum Sonobudoyo Yogyakarta yang terjadi sejak 2010 hingga kini belum menunjukkan titik terang. Kasus yang terjadi pada 11 Agustus 2010 lalu mengakibatkan 75 koleksi emas museum raib, salah satunya topeng emas yang diduga peninggalan zaman Majapahit. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Undang SKK Migas Bahas Kinerja tahun 2013



Suasana RDP Komisi VII DPR dengan SKK Migas.

Komisi VII DPR mengundang SKK Migas membahas kinerja SKK Migas tahun 2013 hari Kamis, 9 Oktober. “Kita ingin tahu progres kinerja 2013 dan juga ingin mengetahui progres reformasi yang dilakukan pasca tertangkapnya mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini,” ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana saat RDP dengan

Plt Kepala SKK Migas J. Widjonarko, di Gedung Nusantara I, Rabu, (9/10).

Menurut Sutan, banyak pemberitaan di berbagai media online yang mengatakan kinerja SKK Migas menu-run bukan membaik. “Ini langsung kita konfirmasi dalam RDP kali ini,” tandasnya.

Dia menambahkan, dirinya melihat adanya ketakutan di dalam internal SKK Migas bahkan mulai terjadi saling tidak percaya di lembaga tersebut. “Kita ingin mengevaluasi kinerja tahun 2013 dapat dipaparkan dengan data pendukung serta pendalaman bagi dewan,” terangnya. (si), foto : iwan armanias/parle/hr.

Komisi VIII Serap Aspirasi Pekerja Sosial

Sekitar 36 ribu pekerja sosial di lapangan mempertanyakan nasib dan kejelasan statusnya, membuat Komisi VIII tergerak membuat panitia kerja (Panja). Meski demikian masih terlalu dini untuk membicarakan apakah kemudian pekerja sosial ini akan dirancangan sebuah undang-undang khusus pekerja sosial.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir usai rapat intern Panja Pekerja Sosial, Senin (7/10). Dikatakan Mahrus, sebagai penyambung aspirasi rakyat, Komisi VIII merasa perlu untuk secara serius mendiskusikan bersama tentang nasib, posisi, dan status dari pekerja sosial. Karena menurutnya tak dapat dipungkiri, Peran pekerja sosial di lapangan sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat.

“Meski demikian, saat ini kita masih mencoba menyamakan persepsi apa itu pekerja sosial, kinerjanya seperti apa, dan apakah selama ini status mereka sudah terakomodir dalam Undang-undang. Jika memang belum terakomodir, mungkin saja kedepannya hal itu bisa menjadi sebuah rancangan undang-undang tersendiri. Dan sebaliknya jika hal tersebut sudah terakomodir dalam undang-undang yang ada, misalnya Undang-undang kesejahteraan sosial, maka apakah kita harus merevisi atau melakukan perubahan yang bisa mengakomodir aspirasi dari pekerja sosial itu,” papar Mahrus.

Ditambahkan Mahrus untuk mengakomodir aspirasi itu jika belum bisa berbentuk RUU atau perubahan Undang-undang yang ada, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mema-



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Mahrus Munir.

sukannya dalam sebuah Peraturan pemerintah atau Peraturan Menteri. Menurut Mahrus hal tersebut sangat memungkinkan mengingat aspirasi tentang pekerja sosial ini muncul dari Kementerian Sosial yang notabene merupakan mitra kerja dari Komisi VIII DPR RI. (Ayu)foto:wahyu/parle

Pemerintah Harus Awasi Impor Ikan

Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Murtazam menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap impor ikan untuk kebutuhan industri. Pasalnya, ikan-ikan industri ini juga beredar di pasar bebas.

“Ada beberapa hal yang mesti disinkronisasi di pemerintah. Izin impor untuk ikan industri agar tidak merembes ke pasar. Kementerian Perindustrian harus melakukan pengawasan. Impor ikan industri itu untuk bahan baku industri, bukan untuk konsumsi,” jelas Ibnu usai RDP di ruang rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Rabu (9/10) sore.

Untuk membahas hal itu, Komisi IV melakukan RDP dengan Dirjen Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian dan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu.

Pemerintah, tambah Ibnu, khususnya Kementerian Perindustrian harus



Anggota Komisi IV DPR Honing Sanny dan Zainut Tauhid Sa'adi.

melakukan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan impor ikan ini. Jika perlu, dilakukan penyitaan terhadap ikan-ikan itu.

“Sekarang kita lihat jajaran di Kemenperin belum ada yang mengawasi,

pengawasan hanya sebatas industrinya saja. Jika dilakukan penyitaan, mereka yang nakal, atau yang merembeskan ke pasar itu akan jera. Tapi bila tidak disita, itu akan memukul nelayan-nelayan kita,” tambah politisi PKB ini.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Honing Sanny menyatakan bisnis di bidang perikanan memang bisnis yang menggiurkan untuk orang-orang yang ingin curang. Hal itu ditambah pula lemahnya pengawasan terhadap wilayah laut Indonesia. Sehingga, sumber daya ikan yang harusnya menjadi komoditas unggulan, malah tidak dimanfaatkan secara maksimal.

“*Illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing, dan kemudian melakukan packaging di kapal, kemudian masuk Indonesia, itu seolah-olah dianggap impor. Hal ini harus diperbaiki, dengan cara menambah secara maksimal armada kapal, kemudian melakukan pengawasan secara intensif, supaya mengurangi *illegal fishing*,” ujar Honing.

Politisi PDI-P ini juga meminta agar masyarakat Indonesia tidak bergantung pada ikan impor. Walaupun ada ikan yang memang tidak bisa dibudidayakan di Indonesia, namun komoditas itu bisa diganti dengan ikan jenis lainnya.

“Yang bisa dilakukan adalah membiasakan masyarakat untuk mengonsumsi ikan yang memang hasil laut Indonesia. Saya kuatir, selama ini masyarakat diajak untuk mengonsumsi ikan salmon, yang katanya memiliki protein tinggi. Padahal ikan salmon, tidak mungkin bisa dibudidayakan di Indonesia. Kita punya potensi kakap merah yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding salmon,” tambah Honing.

Politisi asal NTT ini yakin kualitas

ikan yang diproduksi di Indonesia itu tidak kalah dibanding ikan impor. Untuk itu, ia meminta pemerintah harus memperhatikan nasib nelayan. Sehingga, ketika fasilitas nelayan memadai, maka hasil tangkap nelayan semakin meningkat.

“Nelayan harus diberikan fasilitas secara maksimal, bukan hanya dimanfaatkan. Jika nelayan tidak diberi fasilitas, maka tangkapan menurun, sehingga memberikan ruang kepada orang-orang untuk melakukan impor. Basis dari perubahan supaya stok ikan menjadi baik adalah menambah armada, dan meyakinkan nelayan bahwa profesi ini sangat baik,” tutup Honing. (sf) Foto: wahyu/parle.

Neraca Gula Tidak Dipegang Dengan Benar

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dirjen Industri Agro dinilai mempermainkan angka kebutuhan gula di dalam negeri serta mengeluarkan izin produksi gula rafinasi secara tidak tepat. Akibatnya, neraca gula pun tidak dipegang dengan benar.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman (F-PD) saat RDP dengan pemerintah menyangkut membantarnya produksi gula rafinasi ke pasar-pasar konsumsi rumah tangga. “Kunci rafinasi ada pada Dirjen Industri Agro yang memberikan izin *raw sugar*,” kata Azam saat rapat dengan BKPM, Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, AGRI, dan 11 perusahaan gula rafinasi, Selasa (8/10).

Masalah tata niaga gula sebenarnya sangat sederhana.

tinggal dilihat saja berapa produksi gula berbasis tebu, lalu konsumsi dalam negeri berapa. Dari perhitungan itu akan terlihat jelas berapa sesungguhnya gula konsumsi rumah tangga yang dibutuhkan. Masalahnya, gula rafinasi atau *raw sugar* ikut masuk mengacaukan kebutuhan gula dan merusak harga gula petani.

“Neraca gula tidak dipegang dengan betul. Hanya bermain-main dengan angka. Jangan kita bermain-main dengan angka. Kalau kita bermain-main dengan angka, berarti kita bermain-main dengan kesejahteraan petani. Jangan coba-coba untuk itu,” tegas Azam lagi.

BKPM telah memberikan izin produksi rafinasi, tanpa koordinasi dengan baik bersama Kemenperin. Sebagai Wakil Ketua Komisi VI, pihaknya segera meminta agar memanggil menteri-menteri terkait untuk meminta klarifikasinya soal ini. Kebutuhan gula dalam negeri belum dilihat dengan teliti.

“BKPM bertanggung jawab, karena telah memberikan izin. Ini tataran di bawah presiden. Presiden tidak sampai ke sana. Jangan bermain-main dengan kepentingan rakyat, katanya lebih lanjut.

Sementara itu, dalam rapat tersebut pemerintah juga menyebutkan ada lima perusahaan produsen rafinasi yang diduga melakukan rembesan ke pasar konsumsi. Di antaranya ada PT. Duta Sugar Internasional, PT. Berkah Manis Makmur, PT. Sentra Utama Jaya, dan PT. Permata Dunia Sukses Utama. Sanksi tegas harus diterapkan kepada perusahaan yang merusak harga gula petani berbasis tebu. (mh)

Foto: iwan armanias/parle.

Delegasi Setjen DPR Hadiri Sidang ASGP 2013 di Jenewa



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti di tengah Sidang ASGP di Jenewa, Swiss.

Sidang *Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)* diselenggarakan di Jenewa -Swiss 7-9 Oktober bersamaan dengan penyelenggaraan Sidang *Assembly Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-129 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3-9 Oktober 2013. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si, selaku Anggota ASGP menghadiri Sidang tersebut didampingi oleh jajaran Sekretariat Jenderal DPR-RI

Sidang ASGP merupakan forum pertemuan dan komunikasi antar-Sekretaris Jenderal dan pejabat Setjen parlemen sedunia dalam rangka tukar menukar informasi dan berbagi pengalaman terbaik (*best practices*) mengenai keparlemen dan *supporting system* sebagai sarana mempererat kerja sama antar-parlemen. Selain itu, ASGP juga merupakan forum untuk menyampaikan program-program IPU dan mendorong SETJEN masing-masing Parlemen Anggota IPU untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program-program tersebut.

Pertemuan ASGP di Jenewa kali ini membahas 3 (tiga) topik utama, yaitu: Bagaimana parlemen nasional menindaklanjuti tugas dan fungsi anggota parlemen yang menghadiri sidang-sidang parlemen internasional; Gedung Parlemen - tantangan dan kesempat-

an; dan munculnya diplomasi parlemen -praktik, tantangan dan risiko.

Selama persidangan berlangsung, Sekjen DPR-RI menyampaikan beberapa intervensi, pertanyaan, dan penjelasan, terhadap topik-topik yang dibahas pada tema tindak lanjut hasil sidang internasional. Sekjen DPR RI menyampaikan bahwa hasil kerja Delegasi DPR RI yang menghadiri sidang-sidang internasional ditindaklanjuti antara lain melalui penyampaian hasil sidang kepada Komisi DPR-RI dan Kementerian terkait untuk dibahas bersama dalam rapat kerja. Selanjutnya DPR menggunakan fungsi pengawasan untuk melihat implementasi dari tindak hasil sidang tersebut.

Berkaitan dengan perlunya membangun dan renovasi beberapa gedung parlemen di berbagai negara, Sekjen DPR RI menyampaikan bahwa bagi DPR RI pembangunan ataupun renovasi gedung diperlukan. Peralnya kapasitas gedung yang ada semula hanya diperuntukkan bagi aktifitas anggota DPR sejumlah sekitar 800 orang, tetapi dengan penambahan jumlah anggota DPR, tenaga ahli, asisten dan tamu, gedung tersebut setiap hari ditempati oleh sekitar 3.000 orang.

Disamping itu gedung tersebut mengalami kerusakan, pada beberapa

bagian terdapat keretakan bangunan akibat tiga kali mengalami gempa bumi. Tetapi, kata Sekjen, pembangunan yang telah secara matang direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena mendapatkan penolakan dari publik sehingga sampai saat ini pembangunan/renovasi gedung masih tertunda.

Pada tema diplomasi parlemen, Sekjen DPR RI menyampaikan bahwa diplomasi parlemen Indonesia adalah "suara rakyat" maknanya DPR RI dalam melaksanakan tugasnya mendengar aspirasi masyarakat. Sebagai konsekuensinya hal ini memungkinkan adanya perbedaan pandangan antara DPR dengan pemerintah. Dalam pelaksanaan diplomasi parlemen, DPR RI telah membentuk 59 Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang memiliki program antara lain saling berkunjung antar Pimpinan dan anggota DPR dalam rangka memperkuat hubungan baik dan membangun saling kesepahaman serta bertukar pandangan dan informasi terkait pembangunan demokrasi dan membuka kesempatan kerja sama antar parlemen untuk menyuarakan kepentingan nasional. Diplomasi parlemen sebagai *second track diplomacy* terbukti efektif namun belum dikenal secara luas oleh masyarakat, sehingga terkesan sebagai bentuk "jalan-jalan. Hal ini menjadi tantangan bagi Setjen DPR RI untuk menyediakan bantuan teknis yang diperlukan guna memperkuat peran diplomasi parlemen dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Hasil sidang ASGP akan dituangkan dalam bentuk *Minutes of ASGP Meeting* tahun 2013 yang memuat *highlight* presentasi dan hasil-hasil diskusi yang disepakati bersama. Sidang ASGP ini juga mengadopsi dokumen berjudul Prinsip-Prinsip Rekrutmen dan Manajemen Karir Staf Parlemen yang ditujukan sebagai referensi bagi Anggota ASGP dalam manajemen rekrutmen dan karir staf parlemen. (mp), foto : dok/parle/hr.



Suasana RDP Komisi I DPR dengan LPP RI membahas RKA K/L dan program RRI tahun anggaran 2014, Selasa (8/10) di Gedung Nusantara II (foto: wahyu/parle)



Suasana RDP Komisi VI DPR dengan Kemendag, Kemenperin, AGRI, BKPM, dan sebelas perusahaan gula rafinasi, membahas evaluasi tata niaga gula, Selasa (8/10) di Gedung Nusantara I (foto: odjie/parle)



Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo membahas peran serta Lemsaneg dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, Kamis (10/10). (foto:Rizka/Parle)